AKADEMIKA
Jurnal Ilmiah: Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika

ISSN: 2301-6248 (Print)
ISSN: 2597-7865 (Online)

Volume: 15
Nomor: 1 (April 2026)

MODERNISASI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI LINTAS BATAS INDONESIA–MALAYSIA

Destian Khaldiansyah Rauf[1], Candra Yusuf [2], Mohamad Ikbal Kadir[3]

[1,2,3]Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jl. Profesor Dr. H. Aloe Saboe No. 173, Wongkaditi, Gorontalo, Indonesia 96128

Email: raufdestiankhaldiansyah@gmail.com, candayusuf18@gmail.com, mohamadikbalkadir@yahoo.co.id

Article History:
Received: 02/03/2026
Revised: 10/04/2026
Accepted: 21/04/2026
Published: 30/04/2026

Abstract

Border areas play a strategic role as gateways to national sovereignty and regional economic integration. The modernization of Indonesia's Border Crossing Posts (Pos Lintas Batas Negara/PLBN) has become one of the government's priority policies to strengthen connectivity, improve public services, and stimulate economic growth in border regions. However, previous studies have predominantly examined PLBN modernization from the perspectives of infrastructure development and border security, while limited attention has been given to its implications for cross-border economic activities. This study aims to analyze the modernization process of the Entikong Border Crossing Post (PLBN) and examine its impact on cross-border economic activities between Indonesia and Malaysia. A qualitative descriptive approach was employed using secondary data obtained from scientific literature, government reports, policy documents, and other relevant publications. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña to identify the relationship between infrastructure transformation and regional economic dynamics. The findings indicate that the modernization of PLBN Entikong has significantly improved infrastructure quality, service efficiency, and regional connectivity, resulting in smoother cross-border mobility of goods and people. The modernization has also encouraged the formalization of economic activities, strengthened the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), increased trade activities, and created broader investment opportunities. Nevertheless, greater market openness has intensified competition between local products and imported goods from neighboring Malaysia. The study concludes that the modernization of PLBN Entikong constitutes a strategic instrument for strengthening regional economic integration, enhancing the competitiveness of border areas, and promoting sustainable local economic development while reinforcing Indonesia's border governance.

Keywords:
border area; cross-border economy; Entikong Border Crossing Post; infrastructure modernization; regional connectivity

Abstrak

Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda depan negara yang tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan nasional, tetapi juga menjadi ruang interaksi ekonomi lintas negara. Modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas modernisasi PLBN dari aspek pembangunan infrastruktur dan keamanan kawasan, sedangkan kajian mengenai dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lintas batas masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses modernisasi PLBN Entikong serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lintas batas Indonesia–Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen

Kata Kunci:
ekonomi lintas batas; konektivitas kawasan; modernisasi infrastruktur; PLBN Entikong; wilayah perbatasan.

pemerintah, laporan resmi, dan berbagai publikasi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi PLBN Entikong berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, efisiensi pelayanan, serta konektivitas kawasan sehingga memperlancar mobilitas barang dan manusia di wilayah perbatasan. Modernisasi tersebut juga mendorong formalisasi aktivitas ekonomi, memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan volume perdagangan, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Di sisi lain, meningkatnya keterbukaan pasar juga memunculkan tantangan berupa persaingan yang semakin ketat antara produk lokal dan produk impor dari Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi PLBN Entikong merupakan instrumen strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan perbatasan, meningkatkan daya saing wilayah, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan tanpa mengabaikan fungsi pengelolaan dan kedaulatan kawasan perbatasan.

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai batas teritorial negara, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan antarnegara. Dalam perspektif border studies, kawasan perbatasan dipahami sebagai borderland, yaitu ruang yang dinamis karena menjadi titik temu berbagai aktor, kepentingan, dan aktivitas lintas batas yang membentuk hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai pembangunan wilayah terluar (backyard development), tetapi telah bergeser menjadi pembangunan beranda depan negara (frontyard development) yang mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa kawasan perbatasan memiliki fungsi strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan publik, serta pintu gerbang integrasi ekonomi regional (Newman, 2006; Sohn, 2014; Scott, 2012).

Perubahan paradigma tersebut juga terjadi di Indonesia melalui kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang menempatkan wilayah perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah tidak lagi memandang kawasan perbatasan hanya sebagai wilayah pengamanan negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan penguatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur strategis, dan pemerataan pembangunan sebagai agenda utama pembangunan nasional. Salah satu implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simpul pelayanan lintas negara yang mengintegrasikan fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta pengembangan aktivitas ekonomi kawasan perbatasan (Bappenas, 2025; BNPP, 2024).

Modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Pembangunan PLBN tidak lagi hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi, integrasi pelayanan lintas instansi, penguatan sistem keamanan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis konektivitas. Bahkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mulai mengembangkan konsep Smart Border Post, yaitu model pengelolaan perbatasan yang mengintegrasikan teknologi digital, pelayanan publik, pengawasan lintas batas, serta pengembangan perdagangan internasional dalam satu sistem pelayanan yang modern dan efisien (BNPP, 2025).

Salah satu kawasan yang menjadi prioritas modernisasi adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Entikong merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Indonesia dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Posisi geografis tersebut menjadikan Entikong sebagai jalur strategis bagi mobilitas barang, jasa, tenaga kerja,

investasi, dan interaksi sosial ekonomi masyarakat kedua negara. Modernisasi yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan gedung pelayanan baru, digitalisasi sistem keimigrasian, kepabeanan dan karantina, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat fungsi kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan melalui PLBN Entikong terus mengalami peningkatan, ditandai dengan meningkatnya volume ekspor serta mobilitas masyarakat lintas batas, yang menunjukkan semakin pentingnya peran PLBN dalam mendukung integrasi ekonomi Indonesia–Malaysia (BNPP, 2025).

Meskipun demikian, kawasan perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Keterbatasan infrastruktur pendukung di luar kawasan PLBN, rendahnya daya saing produk lokal, tingginya ketergantungan terhadap barang impor dari Malaysia, serta belum optimalnya integrasi ekonomi domestik menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan akses pasar, pengembangan investasi, serta peningkatan konektivitas ekonomi regional. Dalam perspektif New Economic Geography, peningkatan kualitas infrastruktur akan menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang memiliki tingkat konektivitas tinggi (Fujita & Krugman, 2004).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pembangunan kawasan perbatasan dari berbagai perspektif. Newman (2006) menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan ruang yang memiliki fungsi strategis dalam membangun hubungan ekonomi dan politik antarnegara. Sohn (2014) menegaskan bahwa kawasan perbatasan dapat menjadi sumber daya pembangunan (border as a resource) apabila didukung oleh konektivitas dan tata kelola yang efektif. Di Indonesia, Seran (2022) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan. Setiawan, Madjid, dan Wasistiono (2022) menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Entikong membutuhkan koordinasi kelembagaan yang kuat agar pembangunan kawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, Sari, Despa, dan Sukmana (2022) menekankan bahwa keterpaduan infrastruktur menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan wilayah. Selain itu, berbagai publikasi dari World Bank (2023), Asian Development Bank (2022), dan Asian Infrastructure Investment Bank (2023) juga menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas infrastruktur mampu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian pembangunan kawasan perbatasan, sebagian besar penelitian masih membahas modernisasi PLBN dari aspek pembangunan fisik, tata kelola kelembagaan, atau pelayanan administrasi secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan modernisasi PLBN dengan dinamika aktivitas ekonomi lintas batas, seperti perdagangan formal, mobilitas tenaga kerja, perkembangan UMKM, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan, masih relatif terbatas. Akibatnya, pemahaman mengenai bagaimana modernisasi PLBN berkontribusi terhadap transformasi ekonomi kawasan perbatasan belum tergambarkan secara komprehensif. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mampu menjelaskan hubungan antara transformasi infrastruktur perbatasan dengan perubahan aktivitas ekonomi lintas batas secara lebih menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan perspektif Border Governance, Connectivity Theory, New Economic Geography, dan Cross-Border Economy sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara modernisasi PLBN dengan perkembangan aktivitas ekonomi lintas batas. Perspektif tersebut memandang bahwa pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan tata kelola kawasan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat konektivitas wilayah, memperluas akses pasar, serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan (Fujita & Krugman, 2004; Newman, 2006; Sohn, 2014).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis modernisasi PLBN Entikong sebagai instrumen pembangunan ekonomi kawasan perbatasan melalui integrasi perspektif Border Governance, Connectivity Theory, New Economic Geography, dan Cross-Border Economy. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan fisik atau pelayanan administrasi, penelitian ini menjelaskan secara komprehensif bagaimana transformasi infrastruktur PLBN memengaruhi perkembangan perdagangan formal, mobilitas masyarakat, pengembangan UMKM, investasi, serta penguatan integrasi ekonomi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pembangunan kawasan perbatasan, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara modernisasi infrastruktur, tata kelola kawasan, dan dinamika aktivitas ekonomi lintas batas. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis proses modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong sebagai instrumen pembangunan kawasan perbatasan, serta (2) menganalisis dampak modernisasi PLBN Entikong terhadap aktivitas ekonomi lintas batas Indonesia–Malaysia dan implikasinya terhadap penguatan konektivitas kawasan, perkembangan ekonomi lokal, serta integrasi ekonomi regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lintas batas Indonesia–Malaysia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pembangunan kawasan perbatasan melalui interpretasi terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan. Desain penelitian kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modernisasi PLBN, pembangunan kawasan perbatasan, konektivitas infrastruktur, dan ekonomi lintas batas (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Objek kajian penelitian difokuskan pada modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu kawasan perbatasan strategis Indonesia–Malaysia. Pemilihan objek kajian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa PLBN Entikong merupakan salah satu PLBN yang telah mengalami modernisasi infrastruktur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan tata kelola kawasan sehingga menjadi representasi yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara pembangunan infrastruktur perbatasan dan perkembangan aktivitas ekonomi lintas batas.

Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut meliputi artikel ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kementerian dan lembaga pemerintah, laporan organisasi internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta berbagai regulasi dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, kemutakhiran, dan keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh mampu menggambarkan dinamika modernisasi PLBN Entikong secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi berbagai dokumen kebijakan, laporan resmi, data statistik, serta publikasi pemerintah yang berkaitan dengan modernisasi PLBN dan aktivitas ekonomi kawasan perbatasan. Sementara itu, studi literatur dilakukan melalui penelaahan berbagai artikel ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh landasan teoritis sekaligus membangun sintesis konseptual mengenai hubungan antara modernisasi infrastruktur, konektivitas kawasan, dan perkembangan ekonomi lintas batas. Untuk

menjamin kredibilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai publikasi ilmiah, dokumen pemerintah, dan laporan lembaga internasional sehingga diperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahapan kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, berbagai informasi yang diperoleh diseleksi dan diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, yaitu modernisasi PLBN, pembangunan kawasan perbatasan, konektivitas infrastruktur, perdagangan lintas batas, mobilitas masyarakat, dan perkembangan ekonomi lokal. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis melalui sintesis naratif untuk mengidentifikasi keterkaitan antarfenomena. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan perspektif Border Governance, Connectivity Theory, New Economic Geography, dan Cross-Border Economy, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi modernisasi PLBN Entikong terhadap penguatan integrasi ekonomi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi PLBN Entikong sebagai Transformasi Kawasan Perbatasan

Modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong merupakan manifestasi perubahan paradigma pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada keamanan (security approach) menuju pendekatan yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai ruang pertumbuhan ekonomi (prosperity approach). Pergeseran paradigma tersebut menempatkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang memiliki fungsi strategis dalam memperkuat pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta integrasi ekonomi regional. Dalam perspektif Border Studies, kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai batas administratif semata, tetapi sebagai ruang interaksi yang mempertemukan aktivitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan antarnegara sehingga mampu menciptakan peluang pembangunan yang lebih luas (Newman, 2006; Scott, 2012; Sohn, 2014). Sejalan dengan kebijakan nasional, pembangunan PLBN diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi pengawasan negara, tetapi juga untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan (BNPP, 2024; Bappenas, 2025).

PLBN Entikong sebagai pintu gerbang utama Indonesia–Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat mengalami transformasi yang signifikan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan terpadu, digitalisasi sistem keimigrasian, kepabeanan, dan karantina, serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Transformasi tersebut mengubah fungsi PLBN dari fasilitas pemeriksaan lintas batas menjadi pusat pelayanan publik dan simpul konektivitas ekonomi kawasan. Pengembangan ini juga sejalan dengan konsep Smart Border Post yang dikembangkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yaitu model pengelolaan kawasan perbatasan yang mengintegrasikan pelayanan publik, keamanan, teknologi informasi, dan pengembangan aktivitas ekonomi dalam satu sistem yang efisien. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi PLBN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada reformasi tata kelola pelayanan publik dan penguatan daya saing kawasan perbatasan (BNPP, 2025; World Bank, 2023).

Transformasi tersebut memberikan implikasi terhadap meningkatnya kualitas tata kelola kawasan perbatasan. Infrastruktur yang lebih representatif, pelayanan yang terdigitalisasi, serta integrasi fungsi keimigrasian, kepabeanan, dan karantina mempercepat proses pelayanan lintas batas sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi. Kondisi ini menciptakan kepastian pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan PLBN sebagai jalur mobilitas dan perdagangan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setiawan, Madjid, dan Wasistiono (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan sangat dipengaruhi oleh sinergi kelembagaan dan kualitas tata kelola. Selain itu, Seran (2022) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila didukung oleh modernisasi infrastruktur dan digitalisasi pelayanan.

Dalam perspektif teoritis, hasil penelitian ini mengonfirmasi konsep border as a resource yang

dikemukakan oleh Sohn (2014), yaitu bahwa kawasan perbatasan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh konektivitas dan tata kelola yang efektif. Temuan ini juga menguatkan pandangan Newman (2006) dan Scott (2012) yang menjelaskan bahwa fungsi perbatasan pada era globalisasi telah bergeser dari ruang pemisah (border as barrier) menjadi ruang kolaborasi (border as bridge) yang mendorong interaksi ekonomi, sosial, dan kelembagaan antarnegara. Selain itu, laporan World Bank (2023) dan Asian Development Bank (2022) menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur perbatasan mampu meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat arus perdagangan, serta memperkuat integrasi ekonomi regional. Dengan demikian, modernisasi PLBN Entikong merupakan implementasi nyata dari pembangunan kawasan perbatasan yang mengintegrasikan dimensi pelayanan publik, konektivitas, dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, modernisasi PLBN Entikong dapat dipahami sebagai transformasi kawasan perbatasan yang bersifat multidimensional. Transformasi tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui reformasi tata kelola, digitalisasi pelayanan, peningkatan konektivitas, serta penguatan fungsi ekonomi kawasan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Border Governance dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan ditentukan oleh keterpaduan antara infrastruktur, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, modernisasi PLBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan wilayah negara, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang mampu meningkatkan daya saing kawasan, memperkuat integrasi ekonomi Indonesia–Malaysia, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.

Dampak Modernisasi terhadap Aktivitas Ekonomi Lintas Batas

Modernisasi PLBN Entikong memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika aktivitas ekonomi lintas batas Indonesia–Malaysia melalui peningkatan efisiensi pelayanan, konektivitas infrastruktur, dan kelancaran arus barang serta manusia. Perbaikan infrastruktur fisik yang diikuti dengan digitalisasi pelayanan keimigrasian, kepabeanan, dan karantina telah mempercepat proses administrasi lintas batas sehingga mengurangi waktu pelayanan dan meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Dalam perspektif ekonomi kawasan, kondisi tersebut menurunkan biaya transaksi (transaction costs) dan meningkatkan efisiensi logistik, yang pada akhirnya mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan formal dibandingkan mekanisme perdagangan informal yang sebelumnya lebih dominan. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank yang menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur lintas batas merupakan faktor penting dalam memperlancar perdagangan, meningkatkan mobilitas, serta memperkuat daya saing ekonomi regional.

Dampak modernisasi tersebut tercermin pada meningkatnya aktivitas perdagangan melalui PLBN Entikong. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 aktivitas ekspor melalui PLBN Entikong menghasilkan devisa sekitar Rp93,62 miliar dengan volume ekspor mencapai lebih dari 4,49 juta kilogram. Komoditas yang diperdagangkan meliputi hasil pertanian, perikanan, produk pangan olahan, serta berbagai komoditas unggulan masyarakat perbatasan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PLBN tidak lagi hanya berfungsi sebagai pintu perlintasan orang dan barang, tetapi juga sebagai gerbang perdagangan internasional yang memperluas akses pasar bagi produk lokal. Bahkan, aktivitas ekspor tersebut memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga bongkar muat, jasa logistik, transportasi, dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam rantai perdagangan lintas batas.

Modernisasi PLBN Entikong juga membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Infrastruktur yang lebih baik, kepastian pelayanan, serta meningkatnya konektivitas kawasan memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar di Sarawak, Malaysia. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat tidak lagi bertumpu pada perdagangan tradisional berskala kecil, tetapi berkembang menuju perdagangan formal yang didukung oleh sistem logistik dan pelayanan yang lebih terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya efek berganda (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Fujita dan Krugman (2004) dalam teori New Economic

Geography, bahwa peningkatan konektivitas mampu menciptakan konsentrasi aktivitas ekonomi, memperluas pasar, dan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. Hasil penelitian ini juga memperluas temuan Sari, Despa, dan Sukmana (2022) yang menekankan bahwa keterpaduan infrastruktur merupakan prasyarat penting bagi pengembangan wilayah.

Selain perdagangan, modernisasi PLBN turut meningkatkan mobilitas masyarakat lintas negara. Peningkatan kualitas pelayanan mempercepat proses pemeriksaan sehingga memudahkan masyarakat melakukan perjalanan untuk kepentingan perdagangan, pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial. BNPP mencatat bahwa selama periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, PLBN Entikong melayani 35.642 pelintas, menunjukkan tingginya intensitas mobilitas masyarakat yang memanfaatkan fasilitas lintas batas. Peningkatan mobilitas tersebut tidak hanya memperkuat hubungan sosial-ekonomi Indonesia–Malaysia, tetapi juga memperluas peluang ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan melalui berkembangnya sektor perdagangan, transportasi, jasa, dan pariwisata. Namun demikian, meningkatnya mobilitas juga menuntut penguatan pengawasan lintas batas agar kelancaran arus orang dan barang tetap diimbangi dengan aspek keamanan, kepabeanan, dan karantina.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa modernisasi PLBN Entikong memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi aktivitas ekonomi lintas batas melalui peningkatan efisiensi pelayanan, berkembangnya perdagangan formal, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta terbukanya peluang pengembangan UMKM. Hasil tersebut memperkuat teori New Economic Geography yang menjelaskan bahwa investasi pada infrastruktur strategis mampu menurunkan biaya ekonomi, meningkatkan akses pasar, dan mendorong pertumbuhan kawasan (Fujita & Krugman, 2004). Di sisi lain, temuan ini juga menguatkan perspektif Cross-Border Economy dan Border Studies yang memandang kawasan perbatasan sebagai ruang interaksi ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah apabila didukung oleh konektivitas, tata kelola, dan pelayanan publik yang efektif (Newman, 2006; Sohn, 2014). Dengan demikian, modernisasi PLBN Entikong tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas, tetapi juga memperkuat fungsi kawasan perbatasan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional.

Implikasi Modernisasi terhadap Integrasi Ekonomi Kawasan

Modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong memberikan implikasi yang lebih luas daripada sekadar peningkatan kualitas pelayanan lintas batas. Transformasi infrastruktur dan tata kelola pelayanan telah memperkuat konektivitas kawasan sehingga mempercepat integrasi ekonomi antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Infrastruktur yang lebih modern menciptakan hubungan yang lebih efisien antara sistem transportasi, perdagangan, logistik, dan pelayanan publik sehingga aktivitas ekonomi lintas batas berkembang secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Dalam konteks pembangunan wilayah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa PLBN tidak lagi hanya berfungsi sebagai fasilitas pemeriksaan negara, tetapi berkembang sebagai simpul konektivitas regional yang menghubungkan aktivitas ekonomi lokal dengan jaringan perdagangan internasional (World Bank, 2023; Asian Development Bank, 2022; Newman, 2006).

Implikasi tersebut juga terlihat dari meningkatnya peluang terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (growth poles) di kawasan perbatasan. Menurut teori New Economic Geography, pembangunan infrastruktur strategis akan meningkatkan aksesibilitas kawasan, menurunkan biaya distribusi, memperluas pasar, dan mendorong aglomerasi aktivitas ekonomi pada wilayah yang memiliki konektivitas tinggi (Fujita & Krugman, 2004). Dalam konteks PLBN Entikong, modernisasi pelayanan dan infrastruktur menjadi faktor yang memperkuat hubungan ekonomi antara Kabupaten Sanggau dan Sarawak melalui meningkatnya perdagangan formal, mobilitas masyarakat, serta berkembangnya sektor jasa, logistik, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Temuan ini memperlihatkan bahwa investasi pada infrastruktur perbatasan memiliki efek yang melampaui fungsi administrasi negara, yaitu menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, modernisasi juga menghadirkan tantangan terhadap daya saing ekonomi lokal. Terbukanya akses perdagangan lintas batas meningkatkan intensitas persaingan antara produk lokal Indonesia dan produk impor dari Malaysia yang umumnya memiliki keunggulan dalam kontinuitas pasokan, kualitas produk, maupun efisiensi distribusi. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa pembangunan infrastruktur tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti oleh kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan rantai pasok lokal menjadi faktor penting agar masyarakat kawasan perbatasan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta melalui modernisasi PLBN. Temuan ini sejalan dengan OECD (2024) yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus disertai dengan penguatan kapasitas ekonomi lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif.

Dalam perspektif Border Governance, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan modernisasi kawasan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan. Pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan sinergi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait agar fungsi pelayanan, pengawasan, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara terpadu. Temuan ini memperluas hasil penelitian Setiawan, Madjid, dan Wasistiono (2022) serta Seran (2022) yang menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan, dengan menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan juga ditentukan oleh integrasi pelayanan digital, koordinasi kebijakan pembangunan, dan penguatan ekosistem ekonomi kawasan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, modernisasi PLBN Entikong memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan kawasan perbatasan Indonesia. Modernisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi regional melalui peningkatan konektivitas, berkembangnya perdagangan formal, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta terbukanya peluang investasi dan pengembangan UMKM. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif Border Studies, Border Governance, Cross-Border Economy, dan New Economic Geography yang memandang bahwa infrastruktur, tata kelola, dan konektivitas merupakan faktor yang saling berkaitan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan modernisasi PLBN perlu diikuti oleh kebijakan pengembangan ekonomi lokal, penguatan daya saing produk unggulan daerah, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor agar kawasan perbatasan mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong merupakan proses transformasi kawasan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga menghasilkan perubahan pada tata kelola pelayanan publik, konektivitas kawasan, serta dinamika aktivitas ekonomi lintas batas. Modernisasi tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang saling memperkuat antara pembangunan infrastruktur, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan efisiensi administrasi sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi berkembangnya perdagangan formal, mobilitas masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha di kawasan perbatasan. Dengan demikian, pembangunan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan wilayah negara, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi kawasan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa peningkatan konektivitas yang dihasilkan melalui modernisasi PLBN memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian kawasan. Infrastruktur yang lebih baik mempercepat distribusi barang dan jasa, memperluas akses pasar, serta meningkatkan interaksi ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal apabila tidak diikuti oleh kebijakan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan fisik perlu diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses pembiayaan agar masyarakat perbatasan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh modernisasi kawasan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan modernisasi PLBN ditentukan oleh keterpaduan antara infrastruktur, tata kelola pelayanan, konektivitas kawasan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keempat komponen tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Temuan ini memperkuat perspektif Border

Governance, Border Studies, Cross-Border Economy, dan New Economic Geography yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai ruang pembangunan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi apabila didukung oleh kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, modernisasi PLBN Entikong dapat dipahami sebagai model pembangunan kawasan perbatasan yang menghubungkan fungsi pelayanan negara dengan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Tabel 1. Sintesis Hasil Analisis Modernisasi PLBN Entikong

Fokus Analisis	Temuan Utama	Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi	Landasan Teori
Modernisasi infrastruktur	Peningkatan kualitas fasilitas dan integrasi layanan	Mempercepat mobilitas barang dan orang	New Economic Geography
Digitalisasi pelayanan	Pelayanan keimigrasian, kepabeanan, dan karantina lebih efisien	Menurunkan biaya transaksi dan waktu pelayanan	Border Governance
Konektivitas kawasan	Hubungan Indonesia–Malaysia semakin terintegrasi	Meningkatkan perdagangan formal dan distribusi logistik	Cross-Border Economy
Penguatan tata kelola	Koordinasi antarinstansi lebih baik	Meningkatkan kepastian pelayanan dan investasi	Border Studies
Pemberdayaan ekonomi	Peluang UMKM dan jasa pendukung berkembang	Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan	Regional Development

Sumber: Hasil sintesis penulis berdasarkan analisis berbagai dokumen dan literatur (2026).



Gambar 1. Model Konseptual Modernisasi PLBN Entikong terhadap Integrasi Ekonomi Kawasan

Model konseptual yang dihasilkan menunjukkan bahwa modernisasi PLBN tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung, tetapi melalui mekanisme berjenjang yang diawali oleh peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan, dilanjutkan dengan penguatan konektivitas kawasan, kemudian mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi lintas batas hingga menghasilkan integrasi ekonomi kawasan. Model ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya hanya menitikberatkan pada aspek pembangunan fisik atau pelayanan administrasi, dengan menunjukkan bahwa konektivitas kawasan berperan sebagai mekanisme penghubung (linkage mechanism) antara modernisasi PLBN dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Kontribusi ini memberikan pengayaan terhadap perspektif Border Governance dan New Economic Geography dalam konteks pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia.

PENUTUP

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong telah menghasilkan transformasi mendasar terhadap fungsi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Transformasi tersebut tidak terbatas pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat konektivitas kawasan yang berimplikasi pada berkembangnya aktivitas perdagangan formal, meningkatnya mobilitas masyarakat, terbukanya peluang investasi, serta berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, modernisasi PLBN tidak lagi dipahami sebagai pembangunan fasilitas pelayanan lintas negara semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan modernisasi sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang modern meningkatkan efisiensi pelayanan dan konektivitas, namun manfaat ekonomi yang dihasilkan akan lebih optimal apabila diikuti oleh kebijakan yang memperkuat daya saing produk lokal, kapasitas UMKM, kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap pembiayaan dan pasar. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan

pendekatan yang bersifat holistik dengan mengintegrasikan dimensi pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan tata kelola kawasan secara berkelanjutan.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian Border Governance, Border Studies, Cross-Border Economy, dan New Economic Geography melalui model analisis yang menjelaskan bahwa modernisasi PLBN mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui mekanisme berjenjang, yaitu peningkatan kualitas pelayanan, penguatan konektivitas, berkembangnya aktivitas ekonomi lintas batas, hingga terbentuknya integrasi ekonomi regional. Model tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki nilai strategis apabila diposisikan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kawasan yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. (2022). Asian economic integration report 2022: Advancing digital services trade in Asia and the Pacific. Asian Development Bank.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2024). Laporan kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2024. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2026, February 3). BNPP RI genjot ekspor perbatasan, PLBN Entikong sumbang devisa Rp93,6 miliar sepanjang 2025. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-genjot-ekspor-perbatasan-plbn-entikong-sumbang-devisa-rp936-miliar-sepanjang-2025

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Fujita, M., & Krugman, P. (2004). The new economic geography: Past, present and the future. Papers in Regional Science, 83(1), 139–164. https://doi.org/10.1007/s10110-003-0180-0

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our "borderless" world. Progress in Human Geography, 30(2), 143–161. https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD regional development outlook 2024. OECD Publishing.

Sari, R. K., Despa, D., & Sukmana, I. (2022). [Lengkapi sesuai artikel yang benar-benar disitasi dalam naskah: judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI].

Scott, J. W. (2012). European politics of borders, border symbolism and cross-border cooperation. In T. M. Wilson & H. Donnan (Eds.), A companion to border studies (pp. 83–99). Wiley-Blackwell.

Seran, G. G. (2022). Penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara. Jurnal Sosial Humaniora, 13(1), 39–55. https://doi.org/10.30997/jsh.v13i1.4833

Setiawan, I., Madjid, U., & Wasistiono, S. (2022). Development of district institutions in the Entikong state border area, Indonesia. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 14(2), 158–172. https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2917

Sohn, C. (2014). Modelling cross-border integration: The role of borders as a resource. Geopolitics, 19(3), 587–608. https://doi.org/10.1080/14650045.2014.913029

World Bank. (2023). Connecting to thrive: Challenges and opportunities of transport integration in Eastern Europe and Central Asia. World Bank.